**IMPLEMENTASI PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LP3TKI SURABAYA**

**Dita Indah Anggraini**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[ditaanggraini@mhs.unesa.ac.id](mailto:ditaanggraini@mhs.unesa.ac.id)

Arinto Nugroho

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[arintonugroho@unesa.ac.id](mailto:arintonugroho@unesa.ac.id)

Abstrak

Setiap orang yang melakukan sebuah pekerjaan di luar wilayah negara Indonesia, maka disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 1 angka 2 UU PPMI. Pemerintah menyediakan perlindungan hukum bagi PMI. Bukan hanya sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah namun juga memberikan sebuah pembekalan kepada PMI sebelum berangkat agar CPMI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja diluar negeri. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dari BNP2TKI yang diselenggarakan oleh BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI/P4TKI sangat diperlukan bagi CPMI, berawal dari masalah diatas maka peneliti bermaksud mengangkat penelitian tentang Implementasi PAP bagi CPMI di LPT3KI Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah menunjukan bahwa pelaksanakan PAP di LP3TKI Surabaya belum sesuai dengan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per-23/KA/XI/2013. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada pengelompokan kelas PAP sesuai penempatan negara dan jenis pekerjaan yang sama. Ketidaksesuaian juga dibuktikan dengan pemenuhan kapasitas kelas yang berlebih. Adapun kendala pelaksanakan PAP yaitu kendala eksternal timbul dari CPMI karena kurangnya pengetahuan tentang materi PAP yang hanya dianggap sebagai formalitas saja dan .kendala internal jumlah instruktur PAP terdiri 5 orang, jika tidak ada cadangan instruktur maka akan kesulitan mencari instruktur apabila ada instruktur yang berhalangan untuk hadir.

*Kata Kunci: CPMI, PAP, LP3TKI Surabaya*

Abstract

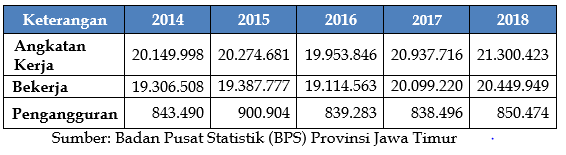
Everyone who does a job outside the territory of the Indonesian state, is referred to as an Indonesian Migrant Worker in Article 1 number 2 UU PPMI. The government provides legal protection for PMI. It is not only a legal protection provided by the government but also provides a briefing to PMI before leaving so that CPMI has mental readiness and knowledge to work abroad. Departure Final Debriefing (PAP) from BNP2TKI organized by BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI/P4TKI is very necessary for CPMI, starting from the problem above, the researcher intends to raise research on PAP implementation for CPMI at LPT3KI Surabaya. The research method used is empirical juridical with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of LAP at LP3TKI Surabaya was not in accordance with the Regulation of the Head of BNP2TKI Number: Per-23/KA/XI/2013. This is evidenced by the absence of PAP class groupings according to the same country placement and type of work. The discrepancy is also evidenced by the fulfillment of excess class capacity. The obstacles to implementing the LAP are external constraints arising from CPMI due to lack of knowledge about LAP material which is only considered a formality and internal constraints, the number of PAP instructors consists of 5 people, if there is no instructor reserve it will be difficult to find instructors if there are instructors who are unable to attend .

*Keywords: CPMI, PAP, LP3TKI Surabaya*

**PENDAHULUAN**

Hak untuk mendapatkan pekerjaan di Negara Indonesia merupakan hak yang sudah dijamin Konstitusi, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Pencapaian tujuan sebagaimana dikehendaki pasal 27 UUD NRI 1945 sungguh merupakan hal yang berat untuk dilaksanakan, mengingat jumlah penduduk yang cukup besar dan tingginya jumlah penduduk terutama penduduk dalam usia angkatan kerja yang siap melakukan suatu pekerjaan, apabila tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan tentunya akan memberikan dampak berkurangnya lapangan pekerjaan, menyebabkan banyaknya penduduk yang sudah memasuki usia angkatan kerja menjadi pengangguran(Adharinalti 2012).

**Tabel 1.1 Data Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengganguran di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sampai dengan 2018**



Pada era globalisasi menciptakan ruang lingkup dunia yang luas. Era globalisasi memberikan dampak peningkatan lalu lintas antar bangsa semakin tinggi, sehingga batas-batas negara semakin mudah dilalui. Setiap negara memiliki kedaulatan terkait pengaturan lalu lintas orang yang keluar masuk ke wilayah negaranya(Manan 2000). Terdapat dalam buku ekonomi ketenagakerjaan karya Elfindri, mengemukakan:

“Globalisasi pada akhirnya menghasilkan suatu perekonomian internasional yang saling terkait. Pusat-pusat pertumbuhan berekmbang dalam hubungan yang saling berkaitan dan saling bersaing. Dapat disebutkan bahwa pertumbuhan kota-kota utama dan atau negara-negara maju merupakan akibat dari pemusatan dan konsentrasi investasi yang terjadi baik dilakukan oleh investor lokal maupun dari luar negeri. Hal ini menyebabkan terjadinya pemusatan kegiatan perdagangan dan aspek lain yang kemudian menyebar didistribusikan ketempat lain. Terkonsentrasinya pusat-pusat perdagangan dan industri pada gilirannya menghasilkan migran”(Bactiar 2004).

Setiap orang yang melakukan sebuah pekerjaan di luar wilayah negara Indonesia, maka disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia. Pengertian Pekerja Migran Indonesia (yang selanjutnya disebut PMI) menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.Sedangkan Calon Pekerja Migran Indonesia (yang selanjutnya disebut CPMI) menurut pasal 1 angka 1 UU PPMI yaitu:

“Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan”.

Setiap tahunnya banyak warga Indonesia yang memilih PMI, berikut data penempatan PMI. Berikut tabel penempatan PMI tahun 2014 sampai dengan 2018.

**Grafik 1.2 Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2014 sampai dengan 2018**

Sumber: BNP2TKI

Banyaknya jumlah PMI yang bekerja di luar negeri, membuat pemerintah menyediakan perlindungan hukum bagi PMI. Bukan hanya sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah namun juga memberikan sebuah pembekalan kepada PMI sebelum berangkat agar calon PMI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja diluar negeri. Pembekalan yang diberikan merupakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

PAP merupakan alur atau langkah terakhir yang dilewati oleh CPMI sebelum berangkat dan itu salah satu perlindungan sebelum bekerja yaitu perlindungan teknis, sesuai dengan pasal 8 ayat (3) UU PPMI yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

1. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
2. Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Jaminan sosial;
4. Fasilitas pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
5. Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja
6. Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja migran Indonesia; dan
7. Pembinaan dan pengawasan.”

Kegiatan PAP merupakan salah satu fungsi dan tugas dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut BNP2TKI). BNP2TKI merupakan sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Terkait tugas dan fungsinya telah tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang BNP2TKI (untuk selanjutnya disebut Perpres Nomor 81 Tahun 2006) dinyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNP2TKI menyelenggarakan tugas :

a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antar pemerintah negara pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;

b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :

1. dokumen;
2. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
3. penyelesaian masalah;
4. sumber-sumber pembiayaan;
5. pemberangkatan sampai pemulangan;
6. peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia;
7. informasi;
8. kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan
9. peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.”

Pengertian PAP sendiri sudah tercantum dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenagaa Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu:

“Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja diluar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.”

Terkait dari pengertian kegiatan PAP ini sangat penting bagi CPMI, karena dengan adanya pembekalan CPMI sebelum berangkat, dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang dihadapai oleh CPMI bekerja diluar negeri. Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut Permen Ketenagakerjaan No. 22 Tahun 2014) menyatakan bahwa:

“PAP dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:

1. Peraturan perundang-undangan di negara penempatan, yang meliputi materi:
2. Peraturan keimigrasian;
3. Peraturan ketenagakerjaan; dan
4. Peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara penempatan.
5. Materi perjanjian:
6. Jenis pekerjaan;
7. Hak dan kewajiban TKI dan pengguna;
8. Upah, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, asuransi TKI;
9. Jangka waktu perjanjian kerja, dan tata cara perpanjangan perjanjian kerja; dan
10. Cara penyelesaian masalah dianggap perlu.
11. Materi lain yang dianggap perlu.”

Peserta PAP adalah CPMI yang telah lulus seleksi adsminitratif/verifikasi dokumen yang dilakukan oleh petugas BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI/P4TKI sebelum mengikuti PAP untuk memastikan kesesuaian data antara dokumen yang satu dengan yang lainnya. “Loka Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya di sebut LP3TKI) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoodinasi dan terintegrasi di wilayah masing-masing unit pelaksana teknis penempatan dan perlindungan TKI. “

**Tabel 1.3 Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan LP3TKI/P4TKI/LTSA di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018**



Berdasarkan data dari tabel diatas terlihat jumlah PMI menurut penempatannya di Jawa Timur paling tinggi di LP3TKI Surabaya, tentu hal ini banyak para Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) mendaftarkan penempatan CPMI melalui LP3TKI Surabaya dan pendaftaran PAP. Persoalannya, meskipun pemerintah sudah memberikan PAP masih terdapat permasalahan yang dihadapi PMI, contohya adalah:

“Seperti yang terjadi pada salah satu mantan PMI yang bernama Fera asal Ponorogo yang pernah bekerja di Hongkong. Ia selama bekerja mendapatkan kekerasan dari majikannya. Hal ini juga membuat PMI tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, peran pemerintah di kampung asal PMI juga tidak luput dari pertanyaannya. Menurut Fera dan para PMI Ponorogo tidak pernah ada pendampingan, pengarahan, atau hal-hal lain yang dapat menjadi bekal mereka untuk bekerja di luar negeri. Padahal di Ponorogo seperti seperti diakui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Ponorogo Bediyanto, ada 5.000 warganya yang bekerja di luar negeri."Seingat saya, tidak pernah ada pembekalan bagaimana TKW beradaptasi di negeri orang. Semisal menghadapi perbedaan cuaca, memahami karakter majikan, atau berobat saat sakit," sebutnya. Padahal, tegas Sriati, hal-hal itu mutlak diperlukan. Pemerintah seharusnya hadir di sana. Dengan begitu, para TKI atau TKW tidak berangkat dengan tangan kosong (Safutra 2018).”

Berdasarkan permasalahan dari laman berita Jawa Pos tersebut, masih ada PMI yang tidak mendapatkan Pembekalan Akhir Pemberangkatan. Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang PPMI menyatakan bahwa:

PMI mempunyai hak yaitu:

“memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan peraturan peruundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.”

Berawal dari masalah diatas maka peneliti bermaksud mengangkat penelitian dengan judul “Implementasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Loka Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan (LP3TKI) Surabaya”.

Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia di LP3TKI Surabaya. Kedua untuk memahami hambatan atau kendala yang dihadapi oleh LP3TKI dalam melaksanakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.

**METODE**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis atau *Social Legal Research*. Jenis penelitian empiris merupakan penelitian hukum untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum termasuk dalam penegakkan hukum *(law enforcement*)(Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad 2013). Penelitian ini berbasis pada ilmu normatif yaitu peraturan perundang-undangan , namun tidak mengkaji aturan dan sistem norma tetapi mengenai reaksi dan interaksi masyarakat. Berkaitan dengan ini penuh mengamati implementasi tentang kegiatan PAP bagi CPMI. Lokasi penelitian dilakukan, pertama di LPT3KI Surabaya yang beralamat di Jalan Bendul Merisi No.2 Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Lokasi kedua PT. Perwita Nusaraya yang beralamat di Jalan Raya By Pass KM 31, Kraton, Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan sesuai yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai yang diinginkan (Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad 2013). Informan dalam penelitian ini adalah yang pertama Koordinator Penyiapan di LP3TKI Surabaya karena yang berwenang memberikan informasi tentang kegiatan progam PAP yaitu Bapak Muhammad Syareza. Kedua petugas Administrasi Proses Akhir Pemberangkatan PT. Perwita Nusaraya karena yang berwenang memberikan informasi terkait CPMI yang sudah dapat mengikuti progam PAP yaitu Ibu Siti Hanifah. Pekerja Migran Indonesia, yang mengikuti proses PAP di Loka Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Surabaya yaitu Yuli, Wulan, Winarti, Murtadzo dan Ahmad Arifin.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer penelitian ini sesuai dengan wawancara dengan informan terkait implementasi pembekalan CPMI di LP3TKI Surabaya.Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan(Zainudin Ali, 2014). Data sekunder tersebut berupa berbagai literatur yang dikelompokkan menjadi beberapa bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-23/KA/XI/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
6. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang bersumber dari website Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
7. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Bachtiar 2018). Pada penelitian ini, teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi:

1. Wawancara adalah teknik mencari data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada LP3TKI Surabaya, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan CPMI.
2. Observasi, teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati keberlangsungan kegiatan PAP yang diselenggarakan oleh LP3TKI Surabaya.
3. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto, beberapa dokumen kegiatan PAP.

Teknik pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan menggunakan data, memilah-milahnya agar menjadi satuan yang dapat dikelolah, yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian terhadap implementasi PAP bagi CPMI di LP3TKI Surabaya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Implementasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di LP3TKI Surabaya**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februai 2020, sehingga peraturan perundang-undangannya masih menggunakan peraturan yang lama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari implementasi yaitu “pelaksanaan atau penerapan” (Pustaka 2008). Secara umum implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Adapun pengertian implementasi menurut beberapa ahli yaitu:.

1. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedara aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Nurdin Usman, 2002).
2. Menurut Guntur Setiawan, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. (Guntur Setiawan, 2004)

Berdasarkan definisi tentang pengertian implementasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan ditetapkan yang berupa suatu aturan untuk mencapai sebuah tujuan. Tahapan implementasi yang dibagi menjadi 3 yaitu tahap pertama merencanakan suatu program atau kegiatan yang jelas mempunyai tujuan dan menentukan sanggran serta waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut, tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan program atau kegiatan dengan mendayagunakan struktur staff, sumber daya, prosedur, dan biaya yang sudah ditetapkan, dan tahap ketiga melakukan pengawasan atau pemantauan pelaksanaan kegiatan atau program (Risky Wulandari, 2019)

Melakukan implementasi tentunya ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam melaksanakan implementasi adalah adanya arahan dan tujuan, sumber daya manusia,waktu dan juga biaya dalam melaksanakannya,kualitas para pelaksana, komunikasi,sikap para pelaksana. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi adalah isi aturan, informasi, dukungan dan pembagian informasi.(Gultom 2020) Apabila iplementasi suatu kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rencana maka dapat dinyatakan pelaksanaannya belum sempurna atau gagal.

Pelaksanakan implementasi tentunya ada pihak-pihak yang harus saling mendukung dan komunikasi supaya implementasi PAP bagi CPMI yang diselenggarakan oleh LP3TKI di Surabaya dapat terlaksana dan tercapai tujuan. Adapun pihak-pihak yang terkait adalah LP3TKI selaku penyelenggara PAP,CPMI selaku peserta PAP, Instruktur/pemateri dan P3MI. Pembekalan Akhir Pemberangkatan merupakan salah satu bentuk perlindungan dari pra pemberangkatan PMI. Berdasarkan pasal 32 Permen Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 bahwasannya PPTKIS/P3MI wajib mengikutsertakan calon TKI/PMI dalam program PAP. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER-23/KA/XI/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Pelaksanaan PAP di LP3TKI Surabaya, terdapat berbagai aspek-aspek dalam pelaksanakannya yaitu:

1. **Waktu dan Pelaksanaannya**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Bapak Muhammad Syahreza sebagai koordinator penyiapan penyelenggara PAP, yang menyatakan waktu dan pelaksanakannya yang diselenggarakan oleh LP3TKI Surabaya setiap hari Senin sampai Rabu yang dimulai dari pukul 07.30-16.30, yang terdiri 5 materi dengan durasi yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan, durasinya selama 90 menit;
2. Perjanjian kerja selama 180 menit;
3. Pengenalan budaya dan adat istiadat selama 90 menit;
4. Pembinaan mental dan kepribadian selama 45 menit;
5. Bahaya narkoba, Pola hidup sehat dan bahaya perdagangannya manusia/*Trafficking,* selama 45 menit.

Waktu dalam kegiatan PAP di LP3TKI Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per-23/KA/XI/2013 yaitu PAP dilaksanakan selama 1 hari dengan durasi 10 jam.

Pelaksanaan PAP bagi CPMI dikemas menjadi 6 (enam) model pembelajaran. Model pembelajaran tersebut secara keseluruhan melalui kegiatan tatap muka. Keenam model pembelajaran PAP bagi calon CPMI tersebut meliputi:

1. CPMI yang ditempatkan oleh P3MI pada pengguna perseorangan
2. CPMI yang ditempatkan oleh P3MI pada pengguna berbadan hukum
3. CPMI yang ditempatkan oleh perusahaan kepentingan perusahaan sendiri
4. CPMI yang bekerja secara perseorangan/mandiri
5. CPMI yang bekerja pada jabatan tertentu (antara lain pekerja spa,pelaut yang bekerja di kapal berbendera asing)
6. CPMI yang ditempatkan oleh pemerintah berdasarkan perjanjian RI dengan pengguna berbadan hukum.

Berdasarkan ke enam model pembelajaran tersebut yang sering digunakan pembelajaran PAP di LP3TKI Surabaya adalah model 1 dan 2, untuk model yang ke 3, 4 dan 5 dilaksanakan juga di LP3TKI Surabaya namun untuk pesertanya tidak sebanyak model pembelajaran yang ke 1 dan 2 dan hari tertentu. Terakhir model pembelajaran yang ke 6, untuk pembekalannya dilakukan oleh pemerintah yang terkait, yang menempatkan CPMInya. CPMI yang mengikuti program PAP akan mendapatkan buku panduan PMI dari LP3TKI sesuai dengan negara yang menjadi tempat kerjanya (Sumas 2020).

**Gambar 1.1 Contoh Buku Panduan PMI**

Sumber: Dokumen Pribadi

Fungsi dari buku panduan PMI adalah untuk membantu CPMI lebih mengerti apabila ada materi PAP yang kurang jelas disampaikan oleh instrukturnya. Isi dari buku panduan PMI tentang peraturan dan budaya mengenai negara tujuan. Pelaksanaan PAP yang diselenggarakan LP3TKI Surabaya masih menggunakan percampuran kelas, seperti menempatkan CPMI yang berbeda jenis pekerjaannya dan kawasan negara penempatan dalam satu ruangan atau kelas.

Pelaksanakan PAP dalam PERKA BNP2TKI No. Per-23/KA/XI/2013 seharusnya dalam satu kelas, peserta sedapat mungkin dikelompokan menurut kawasan negara penempatan atau jenis pekerjaannya. Karena untuk memudahkan peserta PAP atau CPMI untuk memahami materi-materi PAP yang disampaikan oleh Instrukturnya. Namun pelaksanakan PAP yang terjadi di LP3TKI Surabaya belum sesuai dengan peraturannya, masih terdapat dalam satu kelas peserta PAP dari berbeda-beda jenis pekerjaan dan penempatan negara CPMI, dikhawatirkan CPMI menyamakan peraturan, adat istiadat serta budaya setiap negara meskipun sudah memegang buku panduan. Idealnya PAP dilaksanakan sebisa mungkin pesertanya dikelompokkan menurut negara penempatannya atau menurut jenis pekerjaannya dari sektor formal dan informal.

1. **Materi Pembekalan Akhir Pemberangkatan**

Berdasarkan penjelasan Bapak Muhammad Syareza, materi yang disampaikan kepada CPMI ada 5 yaitu:

**Tabel 1.4 Penjabaran Materi Pembekalan Akhir Pemberangkatan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Materi Pelajaran | Instrumen/  Penjabaran Materi | Jumlah  Jampel |
| 1 | Peraturan perundang-undangan di Negara Tujuan | 1. Peraturan keimigrasian ,sepeerti pentingnya mengetahui dokumen keimigrasian (paspor,visa dsb.) 2. Peraturan ketenaga kerjaan, meliputi: syarat-syarat kerja,pengupan,cuti, jam, jam kerja dsb. 3. Peraturan yang berkaitan dengan ketentuan tindak pidana di negara penempatan 4. Peranan perwakilan RI dalam pembinaan dan perlindungan PMI diluar negeri. | 2Jampel  (90menit) |
| 2 | Perjanjian Kerja | 1. Hak dan kewajiban PMI dan Pengguna 2. Upah 3. Waktu Kerja 4. Waktu istirahat/cuti 5. Jenis pekerjaan dan jabatan PMI 6. Jangka waktu perjanjian keja 7. Tata cara perpanjangan perjanjian kerja 8. Cara penyelesaian masalah/perselisihan 9. Asuransi meliputi 10. Pentuingnya asuransi 11. Skema/jenis-jenis pertanggungan asuransi 12. Jumlah klaim/pertanggungan 13. Tata cara pengajuan klaim 14. Remintansi, meliputi: 15. Tata cara pembukaan rekening/buku tabungan 16. Tata cara pengambilan pengiriman uang 17. Keberangkatan dan kepulangan PMI meliputi: 18. Tata cara checkin dan mengisi dokumen keberangkatan 19. Aturan-aturan yang harus diperhatikan di dalam peswat 20. Tata cara transit dan menginap di negara transit 21. Hal-hal yang harus diperhatikan di bandara kedatangan dan cara mengisi dokumen kedatangan 22. Cost Structure (struktur biaya penempatan ) :meliputi singapura, Hongkong, Malaysia dan Taiwan) | 4 Jampel  (180 menit) |
| 3 | Pengenalan Budaya dan adat istiadat negara penempatan | 1. Mengenal budaya dan adat istiadat negara penempatan; 2. Menghormati budaya, adat istiadat/kebiasaan yang berlaku dinegara penempatan 3. Adaptasi dengan lingkungan masyarakat/keluarga pengguna di negara penempatan | 2Jampel  (90menit) |
| 4 | Pembinaan mental kepribadian | 1. Kiat-kiat menjadi PMI yang berhasil 2. Membangun etos kerja dan motivasi kerja 3. Ketahanan nasional (karakter dan jati diri bangsa) 4. Pengembangan TKI Purna Penempatan | 1 Jampel  (45menit) |
| 5 | Bahaya narkoba, Pola hidup sehat (mencegah infeksi menular seksual/IMS dan HIV/AIDS) dan bahaya perdagangan manusia/Tracffickig | 1. Menjelaskan pengertin narkotika/psikotropika dan sejenisnya,IM,HIV/AIDS serta human trafficking 2. Menjelaskan jenis-jenis narkoba IMS, HIV/AIDS | 1 Jampel  (45menit |

Sumber: LP3TKI Surabaya

1. Materi Perundang-undangan di Negara Tujuan, materi tersebut disampaikan instruktur dari UPT-P3TKI Jawa Timur dalam pelaksanakan penyampaian materi batas waktu sampai 90 menit dari penjabaran materi-materi tersebut. Penyampaian materinya hanya garis besarnya saja, karena di dalam kelas merupakan dari berbagai macam CPMI yang akan bekerja di berbagai negara.
2. Perjanjian Kerja, materi tersebut disampaikan instruktur dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur, dengan waktu 180 menit. Dalam penyampaian materi-materi dengan waktu tersebut 180 menit cukup bagi CPMI yang menerima pembekalan. Materi perjanjian kerja merupakan materi dengan waktu terbanyak karena materi tersebut paling penting bagi CPMI berkaitan dengan pekerjaannya. Penyampaian materinya instruktur sudah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Namun, untuk cara penyampaiannya instruktur kurang proaktif dan peka terhadap kondisi CPMInya.
3. Materi Pengenalan budaya adat istiadat negara penempatan, materi tersebut disampaikan instruktur dari UPT-P3TKI Jawa Timur.Pengenalan budaya dan adat istiadat negara tujuan, dimana negara tujaun CPMI dalam satu kelas berbeda-beda. Instruktur menjelaskan tentang adat istiadat negara secara bergantian, misalnya penjelasan pertama instruktur menerangkan dari negara Taiwan selanjutnya Hongkong dan lain-lain.
4. Materi Pembinaan Mental Kepribadian, materi tersebut disampaikan instruktur dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Penjelasan materi tentang mental kepribadian dengan waktu 45 menit cukup bagi CPMI, karena penyampaian materi oleh instruktur sangat mudah dimengerti dan menggunakan kata yang mudah dimngerti oleh CPMI. Instrukturnya juga pro aktif terhadap CPMI yang belum paham.
5. Materi Bahaya Narkoba,Pola Hidup Sehat dan bahaya perdagangan manusia, materi tersebut disampaikan instruktur dari Dinas Kesehatan Jawa Timur. Penyampaian materi yang dijelaskan oleh instruktur dalam waktu 45 menit cukup kurang, karena materi ini merupakan materi terakhir dimana CPMI sudah merasa lelah atau mengantuk. Maka instruktur menjelaskan dengan menggunakan kata yang mudah dipahami dan secara jelas.

Dalam PERKA BNP2TKI No. PER-23/KA/XI/2013, materi PAP terdapat materi inti dan materi penunjang.

**Materi inti** terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan;
2. Perjanjian kerja.

**Materi Penunjang** terdiri dari:

1. Pengenalan Budaya dan adat istiadat negara penempatan;
2. Pembinaan mental kepribadian;
3. Bahaya Narkoba, Pola Hidup Sehat (Mencegah Infeksi Menular Seksual/IMS dan HIV/AIDS),dan Bahaya Perdagangan Manusia/Trafficking.

Terkait pemaparan atau penjabaran materi yang telah disampaikan dalam PAP di LP3TKI Surabaya, sudah sesuai dengan peraturannya. Namun dengan waktu sudah ditentukan untuk penyampaiannya terdapat kekurangan yaitu penyampaiannya hanya secara garis besar tidak dapat secara detail karena dalam satu kelas terdapat peserta PAP yang berbeda dalam jenis pekerjaannya.

1. **Tempat Pelaksanaan**

Pembekalan akhir pemberangkatan yang dilaksanakan dengan cara tatap muka tentunya membutuhkan ruangan. Tempat pelaksanakan PAP dilakukan di BN3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI dan P4TKI setempat. Salah satu tempat yang menyelenggarakan PAP adalah LP3TKI Surabaya. LP3TKI Surabaya dalam pelaksanakan PAP mencakup seluruh provinsi Jawa Timur, karena kebanyakan peserta PAP/CPMI yang mengikuti PAP berasal dari luar Surabaya. Tempat pelaksanaan PAP di LP3TKI Surabaya dilaksanakan diruangan kelas yang telah disediakan dengan sarana prasarana yang dibutuhkan.

Berdasarkan PERKA BNP2TKI No. Per-23/KA/XI/2013 dalam pelaksanakan PAP LP3TKI wajib menyediakan perangkat/fasilitas proses belajar mengajar setiap kelas antara lain:

1. Ruang belajar yang memastikan/memiliki kapasitas minimal 50 orang;
2. Media pembelajaran, antara lain: LCD proyektor, papan tulis,sound system dan sebagainya.

Tempat pelaksanaan kegiatan PAP di LP3TKI Surabaya, telah menyediakan ruang kelas untuk kegiatan PAP dengan fasilitas yang cukup memadahi. Namun terdapat tidak kesesuaian dengan peraturan PERKA BNP2TKI 2013 yaitu ruang untuk belajar atau ruang kelas yang seharusnya berkapasitas 50 orang tetapi di LP3TKI Surabaya diisi lebih dari 60 orang, hal itu membuat ruangan terlihat lebih sempit, kurang nyaman dan tidak leluasa bagi peserta PAP serta tidak kondusif.

1. **Sumber Daya Manusia**
2. **Calon Pekerja Migran Indonesia**

Pengertian CPMI terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU PPMI yaitu:

“Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.”

CPMI yang mengikuti kegiatan PAP merupakan CPMI yang telah lulus seleksi administrasi/verifikasi dokumen oleh petugas LP3TKI Surabaya, untuk memastikan kesesuaian data antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya. Peserta PAP yang di LP3TKI Surabaya adalah CPMI yang sudah melalui prosedur dari awal sampai akhir. Jumlah CPMI yang mengikuti PAP setiap dilaksnakan lebih dari 60 orang.

1. **Instruktur/Pemateri**

Instruktur/Pemateri adalah orang yang menyampaikan materi kepada CPMI yang mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan. Berdasarkan PERKA BNP2TKI NOMOR PER-23/KA/XI/2013 Instruktur PAP harus memenuhi persyaratannya yaitu:

1. “usia maksimum sebagai instruktur 65 (enam puluh lima) tahun;
2. sehat jasmani rohani;
3. pendidikan minimal S1;
4. memiliki sertifikat bimbingan teknis(bimtek) instruktur PAP yang diterbitkan oleh Bidang Deputi Penempatan atau memiliki kompetensi dalm bidang/materi yang diajarkan;
5. mampu berkomunikas dengan baik.”

Aspek yang dinilai dari kemampuan instruktur merupakan yang mempunyai, penguasaan materi, sistematika penyajian, kemampuan menyajikan, relevansi materi dengan tujuan ,penggunaan metode dan media pembelajaran, penggunaan bahasa, serta ketepatan menjawab pertanyaan peserta.

Instruktur PAP di LP3TKI Surabaya merupakan instruktur yang telah melewati uji kompetensi yang diadakan oleh pihak LP3TKI Surabaya. Di LP3TKI Surabaya ada 5 instruktur dari latar belakang pendidikan yang berbeda serta untuk mendapatkan instruktur PAP sesuai dengan materinya, LP3TKI Surabaya bekerja sama dengan UPT-P3TKI Jawa Timur, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Jawa Timur. LP3TKI Surabaya meningkatkan kualitas instrukturnya dengan cara setiap 2 tahun sekali mengadakan uji komptensi bagi instruktur PAP. Jumlah Instruktur di LP3TKI Surabaya yaitu 5 orang,kekurangannya adalah jika ada yang berhalangan hadir maka instruktur digantikan oleh pihak penyelenggara PAP tersebut.

**Kendala yang dihadapi Loka Pelayanan Perlindungan dan Penempatan dalam melaksanakan PAP.**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh LP3TKI Surabaya saat melaksanakan PAP. Kendala tersebut di bagi menjadi dua yaitu:

1. **Kendala Eskternal** : kendala yang berasal dari luar lingkup LP3TKI Surabaya yang berarti terdapat masalah yang timbul dari luar LP3TKI, antara lain:
2. **Calon Pekerja Migran Indonesia**

Syarat-syarat kriteria PMI telah disebutkan di dalam Pasal 5 UU PMI yang berbunyi:

“Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

1. berusia minimal 18 (delapan belas tahun;
2. memiliki kompetensi;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. terdaftar dan memimiliki nomor kepersetaan Jaminan Sosial, dan
5. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.”

Bapak Muhammad Syareza menjelaskan bahwa CPMI harus telah menempuh pendidikan minimal tingkat Sekolah Dasar (SD), karena CPMI harus bisa membaca, menulis, berhitung, serta dapat menerima pembakalan yang akan diterima.

Berdasarkan data yang didapatkan, masih terdapat CPMI yang berusia dibawah 18 tahun atau/dan belum tamat SD. CPMI yang tidak memenuhi syarat pendidikan maupun usia akan sulit memahami pembekalan informasi yang dilaksanakan oleh LP3TKI. Informasi berisi tentang hak/kewajiban CPMI, situasi dan kondisi negara tujuan, dan tata cara perlindungan bagi PMI. Informasi-informasi tersebut sangat penting untuk dipahami CPMI supaya perlindungan hak-hak PMI saat bekerja dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, CPMI yang belum memenuhi syarat usia melanggar peraturan dalam Pasal 5 poin a UU PMI.

Bapak M Syareza juga menjelaskan bahwa CPMI sebagian besar belum mengetahui tentang manfaat dan tujuan PAP. Beberapa CPMI menganggap keikutsertaan kegiatan PAP hanya salah satu formalitas agar dapat bekerja ke luar negeri. Sedangkan, pelaksanaan PAP banyak berguna untuk informasi teknis para PMI ketika bekerja di luar negeri maupun perlindungan hak-hak para PMI.

1. **Tempat Tinggal CPMI dan Lokasi PAP**

Menurut penjelasan dari bapak M. Syareza CPMI yang mengikuti kegiatan PAP kebanyakan dari luar kota Surabaya, seperti Kediri, Lumajang, Gresik, Sidoarjo dan lain-lain. Akibatnya banyak CPMI yang datang terlambat karena jarak jika terlambatnya melewati batas waktu yang ditentukan, maka CPMI harus mengikuti PAP 2 hari kedepan.

1. **Kendala Internal** : kendala-kendala yang berasal dari dalam LP3TKI Surabaya,terjadi karena adanya hambatan internal antar sistem dan pegawai LP3TKI Surabaya
2. **Instruktur/ Pemateri**

Instruktur atau pemateri harus melalui proses panjang untuk bisa menjadi instruktur di PAP LP3TKI Surabaya. Setiap instruktur harus melalui uji kompetensi diadakan oleh LP3TKI. Meskipun sudah melalui uji kompetensi masih terdapat instruktur waktu menyampaikan materi kurang jelas dan dimengerti, sehingga CPMI juga tidak mengerti materi yang disampaikannya.

Total instruktur yang ada di LP3TKI Surabaya sebanyak 5 instruktur satu materi satu instruktur.Hal tersebut masih kurang dikarenakan ketika ada instruktur yang berhalangan untuk mengajar maka tidak ada penggantinya yang sesuai dengan bidangnya meskipun dari pihak LP3TKI Surabaya mempunyai cadangan dari LP3TKInya.

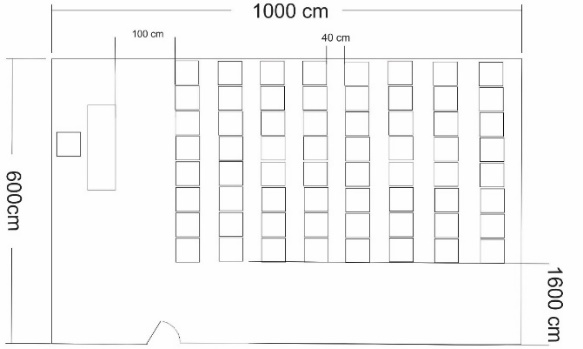
1. **Anggaran atau Pendanaan**

Salah satu hambatan implementasi pelaksanaknaan PAP adalah keterbatasan anggaran. Biaya pelaksanakan PAP yang diperlukan semua ditanggung oleh LP3TKI. Namun anggarannya terbatas hanya untuk penyelanggaraan PAP seperti honor instruktur, percetakan buku panduan dan konsumsi intruktur dan CPMI. Padahal CPMI yang dari luar kota Surabaya yang harus menginap terlebih dahulu sebelum mengikuti program PAP. Biaya penginapannya harus ditanggung oleh CPMI sendiri karena LP3TKI tidak menanggung biaya tersebut karena adanya keterbatasan biaya.

1. **Sarana dan Prasarana**

Kendala sarana prasarana ini seperti kurangnya LCD proyektor yang masih bongkar pasang setiap kegiatan PAP dilaksanakan dan juga *sound system* pengeras suara harus menata terlebih dahulu,serta pendingin ruangan yang tersedia hanya 1 membuat kurang nyaman waktu pembelajaran dilakukan.

**Gambar 1.2 Denah Ruang Kelas PAP**



Sumber: Dokumen Penelitian

Ruang kelas yang digunakan untuk PAP ukuran 10mx6m dengan kapasitas 60 orang. Jarak kursi hanya 40cm, jarak tersebut masih terlalu sempit untuk leluasa berjalan dan untuk penataan kursinya masih kurang, karena akses untuk menuju ke tempat kursi hanya lewat dari samping.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan implementasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di LP3TKI Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan bagi CPMI di LP3TKI Surabaya meliputi beberapa aspek-aspek yaitu, Waktu dan Pelaksanakannya, Materi PAP, Tempat Pelaksanaannya, dan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Perka BNP2TKI Nomor PER-23/KA/XI/2013 dalam pelaksanakan PAP bagi CPMI di LP3TKI Surabaya masih ada tidak kesesuaian dengan peraturan perundang-undangannya yaitu, waktu dan pelaksanakan PAP karena pelaksanakan PAP di LP3TKI Surabaya dalam satu ruang kelas peserta PAP/CPMI dari berbeda-beda jenis pekerjaan dan penempatan negara CPMI, seharusnya dibedakan atau dikelompokan sesuai dengan penempatan atau jenis pekerjaanya. Selanjutnya tempat pelaksanaannya, di LP3TKI Surabaya telah menyediakan ruang kelas untuk kegiatan PAP dengan kapasitas 50 orang namun pesertanya/CPMI melebihi kapasitanya yaitu lebih dari 60 orang.
2. Terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam melaksanakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan CPMI di LP3TKI Surabaya,yaitu:
3. Kendala Eksternal, timbul dari CPMI karena kurangnya pengetahuan tentang materi PAP yang hanya dianggap sebagai formalitas saja, padahal PAP sangat penting untuk bekal sebelum berangkat bekerja di Luar Negeri. Tempat tinggal CPMI ke tempat lokasi PAP karena asal dari CPMI banyak dari luar kota Surabaya sehingga masiha ada yang datang terlambat dari batas waktu yang ditentukan.
4. Kendala Internal, timbul dari instruktur PAP terdiri 5 orang, jika tidak ada cadangan instruktur maka akan kesulitan mencari instruktur bila ada instruktur yang berhalangan untuk hadir. Anggaran terbatas hanya untuk penyelanggaraan PAP. Sarana dan Prasarana kurang luas dengan ukuran 10mx6m dengan kapasitas 60 orang karena tidak leluasa untuk bergerak.

**Saran**

1. Bagi Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) Surabaya. Pelaksanakan PAP sebaiknya CPMI di kelompokan menurut negara penempatan atau jenis pekerjaannya, hal tersebut akan lebih memudahkan bagi Instruktur untuk menyampaikan materi yang harus disampaikan dan CPMI dapat mudah saling berdikusi saling tanya karena penempatan negaranya sama atau jenis pekerjaannya sama, serta menambah instruktur atau pemateri PAP untuk dapat bergantian apabila ada yang berhalangan hadir memeberi materi.
2. Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia hendaknya memperhatikan dengan seksama setiap materi PAP yang dijelaskan tidak menganggap PAP hanya sebagai formalitas dan apabila tempat tinggal CPMI dengan lokasi PAP lumayan jauh hendaknya mencari tempat penginapan yang dekat dengan LP3TKI agar tidak datang terlambat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, Zainuddin. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bachtiar. 2018. *METODE PENELITIAN HUKUM*. edited by O. Yanto. Tangerang Selatan.

Bactiar, Elfindri &. Nasr. 2004. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Padang: Andalas University Press.

Manan, Bagir. 2000. *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2013. *Dualisma Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-23/KA/XI/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

**Jurnal/Skripsi/Thesis**

Adharinalti. 2012. “Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Irregular Di Luar Negeri.” *Rechtsvinding* Vol.1 No.:11.

Gultom, ester oktafiana. 2020. “Implementasi Pendampingan Kegiatan Usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran Yang Diselenggarakan Oleh Loka Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) Di Kabupaten Blitar.” *Novum:Jurnal Hukum* 7 No.2.

Sumas, Sugiarto. 2020. “Evaluasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan Bagi Pekerja Migran Indonesia DiLuar Negeri.” *Jurnal Widya Indonesia* 1.

Wlandari, Risky. 2019. “Implementasi Peraturan Tentang Kepemilikan Apoteker Pada Usaha Kecil Pbat Tradisional Di Kabupaten Sumenep.” Universitas Negeri Surabaya.

**Web**

Pustaka, Balai. 2008. “Implementasi.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved September 21, 2019 (http://www.kbbi.web.id/implementasi).

Safutra, Ilham. 2018. “Menilik Perlindungan Dan Pendampingan TKI Di Kampung Asal.” *Jawa Pos*. Retrieved January 19, 2019 (https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/31/12/2018/menilik-perlindungan-dan-pendampingan-tki- di-kampung-asal).